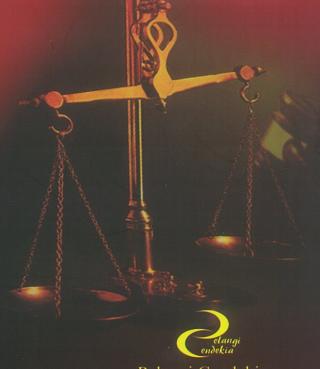
Dr. John Pieris, SH., MS Wiwik Sri Widiarty, SH., MH

NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa



Pelangi Cendekia

Dr. John Pieris, SH., MS & Wiwik Sri Widiarty, SH., MH

NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa

Diterbitkan atas Kerja Sama Penerbit Pelangi Cendekia Jakarta dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI Jakarta 2007 Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa/Dr. John Pieris, SH., MS & Wiwik Sri Widiarty, SH., MH. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007

x + 380 hlm.; 14,5 x 21 cm ISBN: 978-979-1360-00-5

> Hak cipta 2007 ada pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin photo-copy, tanpa izin sah dari penulis dan penerbit.

> > Edisi pertama: April 2007 Disain sampul: Sugeng S.

Alamat Penerbit:
Jl. Pangeran Antasari No. 10 Kebayoran Baru
Ph. 021-72801172
Fax. 021-72801174
Jakarta 12150
Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kerangka Teori dan Konsepsional	21
1. Teori dan Konsep Negara Hukum	22
2. Teori tentang Hak GREGUET CHREGUES.	47
3. Teori Due Care	54
4. Teori dan Konsep Perlindungan Konsumen	59
C. Pandangan Kontrak Kewajiban Produsen terhadap	
Konsumen	70
D. Pengertian-pengertian	83
BAB II : PENGATURAN PEREDARAN PRODUK	
PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN	
PERLINDUNGAN KONSUMEN	85
A. Penerapan Product-Liability sebagai Instrumen Hukum	
Perlindungan Konsumen di Indonesia	85
1. Gambaran Singkat <i>Product-Liability</i>	85
2. Pertimbangan-pertimbangan Yuridis yang Menye-	
babkan Urgenitas Penerapan Instrumen Hukum	
Product-Liability	87

3. Penerapan Product-Liability dalam Tata Hukum Indonesia
C. Peraturan yang Mengatur tentang Pencantuman Produk Pangan Kedaluwarsa
C. Peraturan yang Mengatur tentang Pencantuman Produk Pangan Kedaluwarsa
duk Pangan Kedaluwarsa
D. Peraturan yang Mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Pangan
Pendaftaran dan Penilaian Pangan
BAB III: PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKU- KAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHA- DAP PRODUK PANGAN KEDALUWARSA 113 A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan 113 B. Kriteria Keamanan Pangan 122
BAB III: PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKU- KAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHA- DAP PRODUK PANGAN KEDALUWARSA A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan B. Kriteria Keamanan Pangan 1122
KAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHA- DAP PRODUK PANGAN KEDALUWARSA 113 A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan 113 B. Kriteria Keamanan Pangan 122
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHA- DAP PRODUK PANGAN KEDALUWARSA 113 A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan 113 B. Kriteria Keamanan Pangan 122
DAP PRODUK PANGAN KEDALUWARSA 113 A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan 113 B. Kriteria Keamanan Pangan 122
A. Peran Pemerintah sebagai Badan Pengawas Pangan B. Kriteria Keamanan Pangan 113
B. Kriteria Keamanan Pangan
C. 111010do 1 0111111111111111111111111111
D. Hak Informasi Konsumen sebagai Upaya Perlindungan
Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa 133
Technomical technique 1 1 0 days 2 da
BAB IV: PENANGANAN KELUHAN-KELUHAN
KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PRO-
DUK PANGAN YANG KEDALUWARSA 148
A. Yayasan Lembaga Konsumen Atau Unit Layanan
Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM Atau Unit
Pengaduan Konsumen Departemen Perindustrian dan
Perdagangan sebagai Tempat Pengaduan Konsumen 148
B. Masalah-Masalah yang Diadukan Konsumen tentang
Pangan Kedaluwarsa (Kasus-kasus)
1. Medan – Sumatera Utara
2. Sukoharjo – Jawa Tengah

3. Bandung – Jawa Barat	157
4. Manokwari – Papua	157
5. Jakarta Timur: Tanggal Kedaluwarsa Obat	
Dihilangkan	158
6. Bandung – Jawa Barat	159
7. Ende – Nusa Tenggara	160
8. Kupang – Nusa Tenggara	161
9. Semarang – Jawa Tengah	162
10. Pontianak – Kalimantan	164
11. Sragen, Jawa Tengah	164
12. Jakarta	165
13. Bogor – Jawa Barat	166
14. Temuan Badan POM Jakarta	167
C. Sanksi-Sanksi atau Peringatan yang Dikeluarkan oleh	
Pemerintah dan BPOM	172
BAB V: PENTINGNYA ETIKA DALAM BISNIS	185
A. Ruang Lingkup Etika	185
B. Prinsip Universalitas	188
C. Kesadaran Etis	189
D. Hukum dan Etika	191
Bab VI: PENUTUP	194
A. Kesimpulan	194
B. Saran	197
DAFTAR PUSTAKA	199
LAMPIRAN	207
Indeks	370
Tentang Penulis	377

KATA PENGANTAR

Puku ini dibuat untuk mengkaji masalah perlindungan konsumen dalam perspektif negara hukum. Dalam konteks demikian, secara khusus penulis lalu berusaha mengembangkan pemikiran tentang fungsi hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kedaluwarsa yang terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber dan bahan utama buku ini diambil dari tesis Wiwik Sri Widiarty yang berjudul Perlindungan Kosumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kedaluwarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dipertahankan pada 27 Juli 2006 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis tesis dalam buku ini, bertindak sebagai penulis kedua, dan penulis pertama adalah Dr. John Pieris, SH, MS dosen FH-UKI serta dosen dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum-Program Pascasarjana UKI. Atas kesepakatan bersama penulis pertama dan kedua mengembangkan tesis itu menjadi buku baru. Tentunya pertama-tama dilakukan rekontruksi terhadap tesis itu. Penambahan beberapa teori, terutama teori negara hukum menjadikan buku ini sebuah perspektif pengetahuan yang mungkin bermanfaat.

Produk pangan kedaluwarsa dikaitkan dengan bencana gempa tahun 2006 yang terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya dan

beberapa kasus lain yang aktual diangkat juga untuk dikaji dalam buku ini. Banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat peduli gempa, ternyata berupa makanan yang sudah berjamur, rusak dan tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Banyak korban berjatuhan karena makanan yang kedaluwarsa itu, sehingga pihak rumah sakit yang menangani kasus tersebut disibukkan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap bantuan makanan bagi penderita korban gempa.

Beberapa teori dan konsep pemikiran, selain akan digunakan dalam penulisan ini, diupayakan juga untuk dikritisi. Beberapa peraturan hukum dan perundang-undangan juga digunakan sebagai landasan yuridis untuk menyarati beredarnya makanan yang sudah kedaluwarsa.

Pertumbuhan industri pangan yang menghasilkan produk pangan olahan dewasa ini semakin meningkat. Terdapat berbagai produk industri makanan memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan, khususnya produk pangan yang rusak dan kedaluwarsa, sehingga pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur mengenai produk pangan kedaluwarsa terdapat dalam Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan dalam Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Akhir-akhir ini Unit Layanan Pengaduan Konsumen B POM, sering kali mendapatkan laporan dari konsumen mengenai produk makanan kedaluwarsa. Makanan kedaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal berlakunya. Konsumen dan pelaku usaha merupakan dua kelompok utama yang masing-masing punya kepentingan. Pentingnya informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, bahwa perlu adanya pemasangan label ataupun

standarisasi mutu produk dan keamanan pangan sangat dirasakan untuk produk makanan, mengingat sangat dekat dengan nyawa manusia. Hal ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) No. 02240/B/SK/VI/91 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan bagian 1 angka (2) yang mengatur tentang informasi yang harus dicantumkan pada label.

Dibahas juga mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Philipina, sebagai bahan perbandingan dengan UU Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, mendukung kesejahteraan konsumen dan menetapkan praktek standarisasi di bidang bisnis dan industri.

Penulis

John Pieris & Wiwik Sri Widiarty

Tentang Penulis

Dr. JOHN PIERIS, SH., MS

John Pieris lahir di Ambon pada 18 Agustus 1949. Pekerjaan saat ini: Dosen Tetap FH-UKI dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI. Pekerjaan lain sebagai Konsultan Hukum.

Jabatan struktural yang pernah dan sedang dipegang saat ini adalah:

- Ketua Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) (1998 – 2003)
- Ketua Program Pascasarjana FH-UKI (2004 sekarang) dan Tim Ahli Lembaga Penelitian FH-UKI (2004 sekarang).

Dalam bidang kenegaraan, pernah bertugas sebagai:

- Anggota Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Negara (KPKPN) RI tahun 2002-2004 dengan Keputusan Presiden RI.
- Anggota Komisi Konstitusi MPR-RI tahun 2003-2004 dengan Keputusan Ketua MPR RI.
- Penatar P4 Tingkat Nasional/Manggala BP-7 Pusat dengan Keputusan Presiden RI.

Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

- Pendidikan Advokat dan Konsultan Hukum 2006.
- Doktor dalam Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) di Universitas Indonesia Jakarta tahun 2003.

- Program Bidang Kajian Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1994).
- Magister Administrasi Negara Universitas Padjajaran Bandung tahun 1992.
- Sarjana Hukum Bidang Hukum Administrasi Negara FH-UKI tahun 1983.
- Sarjana Muda Business Administration Akademi Pelayaran Niaga Surabaya tahun 1974.

Telah menulis dan mengedit beberapa buku antara lain:

- Strategi Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan.
- Tragedi Maluku, Sebuah Krisis Peradaban..
- Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Republik Indonesia (penulis bersama dengan Aryanthi Baramuli Putri, SH.,MH);
- Sekilas tentang Politik (Bedah Pikiran Kenneth Minogue);
- Dari Pembangkangan Menuju Sosialisme Humanistik (Bedah Pikiran Erich Fromm);
- Negara Hukum & Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa (penulis bersama dengan Wiwik Sri Widiarty, SH., MH);

Selain itu sebagai pembawa makalah dan nara sumber di berbagai seminar, konsultasi dan loka karya, terutama di bidang hukum, politik dan perundang-undangan, dan menulis esai di beberapa media cetak.

Wiwik Sri Widiarty, SH. MH

Wiwik Sri Widiarty lahir di Makasar 27 September 1965. Saat ini menjadi Dosen S1 Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta (2007).

Ia belajar hukum, mula-mula pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hukum Perdata, lulus tahun 2003, kemudian dilanjutkan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jurusan Hukum Ekonomi dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) tahun 2006.

Seminar-seminar dan kursus yang diikutinya:

- Memantapkan Sinkronisasi Pembangunan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Menuju Legislasi Nasional yang Progresif di Jakarta, 2004.
- Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia, BPHN Departemen Hukum & HAM RI, Jakarta, 2005.
- Seminar tentang Komplikasi Nash dan Hujjah Syar'iyyah dalam Bidang Ekonomi Syariah.
- Seminar tentang Kesetaraan Gender dalam Politik diselenggarakan oleh Cetro, Jakarta 2003.
- Hukum Publik Fakultas Hukum UI bekerja sama dengan DPR RI tentang RUU Kementerian Negara, Jakarta 2007.

Pernah bekerja sebagai:

- Komisaris PT. Widya Utama Jakarta Indonesia (1997-2006).
- Magang di Kantor Anton & Regie Associates Law, Firm, Jakarta (2002-2005).
- Magang di Kantor Pengacara Nining & Partner, Jakarta (2005-2006).

Mengikuti beberapa organisasi, antara lain sebagai:

- Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta (1998-2006).
- Wakil Ketua Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Wilayah DKI Jakarta (2002-2006).

- Ketua Himpunan Pengusaha Angkutan Nasional (HIMPAN) Jakarta Selatan (2001-2006).
- Bendahara Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Kosgoro pusat (2006-2011).



onsumsi masyarakat akan produk-produk pangan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk mampu memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Di lain pihak, iklan dan promosi gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien agar mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang datang dari dalam maupun luar negeri guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Oleh karenanya, diperlukan rumusan standar moral dalam aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi yang tegas. Di sinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dalam kebebasan kontrak sosial untuk melindungi konsumen yang posisinya sering lemah dan dirugikan. Sehubungan dengan itu peraturan-peraturan hukum yang dibuat harus bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral.



Pelangi Cendekia

Jl. Pangeran Antasari 10 Kebayoran Baru, Jakarta Telp. (021) 72801172 Fax. (021) 72801174 E-mail:pelangi_cendekia@yahoo.com